

2

Membelah Karang, Menggali Data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS)

Bilal As'Adhanayadi & Gustaf Wijaya

A. Membuka Tabir Data Kemiskinan: Sebuah Pengantar

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang dilaksanakan di provinsi paling selatan di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), tentu sangat menarik ketika dihadapkan pada fenomena kemiskinan ekstrem yang melanda Indonesia. Tantangan alam dan lokasi yang berpulau-pulau membuat BPS Provinsi NTT harus mengatur siasat sebaik mungkin untuk memenuhi tenggat waktu yang ada. Sayup-sayup terdengar *zoom meeting* yang cukup rutin dilakukan, antarpulau, antarkabupaten, dalam naungan BPS provinsi.

Berbicara tentang sosial ekonomi NTT tentu tidak lepas dari garis kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi serta penanganan

B. As'Adhanayadi & G. Wijaya

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: bila001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

As'Adhanayadi, B., & Wijaya, G. (2023). Membelah karang, menggali data: regsosek Timor Tengah Selatan (TTS). Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (17–58). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c694 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

stunting yang butuh banyak perhatian. NTT adalah peringkat ke-3 provinsi termiskin menurut data BPS, dalam angka 20,44% (BPS, 2022). Artinya, 1 dari 5 orang di NTT, atau sekitar 1 juta dari 5 juta total penduduk NTT, masuk dalam kategori miskin. Sementara itu, miskin ekstrem terjadi pada 212.672 jiwa dalam setidaknya 89.410 rumah tangga. Terdapat lima kabupaten yang menjadi penyumbang angka terbesar, yakni Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021a). Dalam konteks ini, di mana lokus tulisan adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 17,30% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 81.180 jiwa (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021b). Dasar angka lain mengapa NTT sangat memerlukan perhatian dan akurasi data yang kuat adalah situasi kecukupan gizi, atau isu *stunting* yang ada. Selengkapnya disampaikan pada subbab berikutnya.

NTT memiliki banyak potensi. Provinsi ini adalah lumbung jagungnya Indonesia dengan 24% lahan jagung nasional (BPS, 2021). Selain itu, sedang dikembangkan untuk diekspor komoditas lain, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan bawang merah, dengan tujuan utama ke Timor Leste. Di samping pertanian, NTT juga kaya akan mineral yang belum dieksplorasi secara optimal, seperti logam mangan, nikel, tembaga, kromium, dan emas. Batuan Kompleks Bobonaro yang membentuk kepulauan di NTT menjadikannya logam mangan dengan kualitas yang sangat baik dan salah satu yang terbaik di dunia. Tentu eksplorasinya perlu dikaji dan direncanakan sebaik mungkin agar tidak merusak alam dan lingkungan hidup di NTT sendiri. Adapun sumber daya kelautan dan perikanan juga masih banyak menyisakan pekerjaan rumah: perlu ditingkatkan pemanfaatan, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya kelautan tersebut demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT.

Dengan masyarakat etnis yang masih kental dan kuat dalam kesehariannya, wisata budaya dan hasil budaya di NTT masih cukup menjanjikan potensi yang luas. Hasil budaya mencakup variasi kain tenun yang dihasilkan masyarakat, seperti kain tenun khas Sumba, khas Rote, khas Timor Tengah Selatan, dan khas Manggarai. Wisata

budaya ada pada keindahan pariwisata alam dan adat, seperti Pulau Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, Pantai Batu Biru, dan Air Terjun Oenesu. Hal ini bersandingan dengan beragam ritual adat, atraksi budaya, dan upacara adat setempat yang kerap dilaksanakan pada momen tertentu, seperti halnya di Wae Rebo misalnya.

Fokus kali ini mengerucut pada pulau Timor. Sesuai dengan namanya, pulau ini menjadi pulau yang paling timur di gugusan kepulauan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Luas pulau ini mencapai 30.777 km². Separuh timur bagian pulau ini menjadi bagian dari Timor Leste. Pulau ini sudah ada dalam catatan sejarah sejak abad ke-14 pada zaman Majapahit sebagai pulau penghasil kayu cendana, madu, lilin, serta budak (Pageh, 2020). Pada fase berikutnya, pulau ini mulai diduduki Portugis pada pertengahan abad-16 dan mulai menjadikan Kupang sebagai basis perekonomian dan kekuasaannya.

Penghuni lokal pulau ini adalah suku Atoni, juga dikenal sebagai Suku Atoni Meto atau Dawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Uab Meto atau bahasa Dawan. Bahasa ini masih menjadi bahasa sehari-hari masyarakat lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Suku ini hampir tersebar di seluruh wilayah daratan Pulau Timor. Atoni Meto terdiri dari dua suku kata, Atoni adalah manusia atau orang, sedangkan Meto adalah tanah kering sehingga secara kebahasaan, Atoni Meto adalah “orang-orang dari tanah kering”.

Falsafah hidup suku ini adalah Feto-Mone. Feto adalah perempuan dan Mone adalah laki-laki. Suku ini menjunjung tinggi kesatuan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Mone atau laki-laki lebih banyak mengerjakan pekerjaan ranah publik, seperti berperang, bersosialisasi, dan berkebun, sedangkan Feto atau perempuan mengurus ranah privat, seperti mencuci, memasak dan menjamu tamu. Masyarakat Dawan melihat perempuan sebagai “Ibu kehidupan”. Penetrasi agama bersamaan dengan pendudukan kolonial di Pulau Timor membuat sebagian besar warga suku Dawan beragama Kristen Protestan.

Pulau ini dalam sejarahnya menjadi perebutan Hindia Belanda dan Portugis (Pageh, 2020). Hal ini memaksa geopolitik yang ter-

jadi membuka dualisme kepemimpinan. Belanda dan Portugis selanjutnya menempuh perjanjian akad Lisboa pada 1859, hingga mereka menetapkan batas jajah masing-masing atas pulau ini pada 1912. Koloni Portugis, berada di sisi timur, menjadi cikal bakal negara Timor Leste, termasuk Oecussi-Ambeno. Sedangkan Koloni Belanda di sisi Barat masuk dalam provinsi NTT dan Kota Kupang menjadi ibu kota provinsinya.

Timor adalah pulau karang terbesar di Indonesia yang berpenghuni. Jika tanahnya digali maka akan terlihat kapur dan karang. Hal ini membuat vegetasi yang bisa dikembangkan terbatas. Ditambah dengan lokasinya yang terhimpit oleh dua benua, sangat dekat dengan Australia namun masih menjadi bagian dari Asia, cuaca sangat kering dan panas. Hal ini pulalah yang membuat air menjadi barang mewah di pulau ini. Masyarakat sudah akrab dengan pola hidup yang bergantung pada sumber-sumber mata air untuk segala aspek kehidupan mereka. Meskipun di beberapa titik tertentu, seperti di pegunungan sekitaran Gunung Mutis misalnya, curah hujan cukup baik, namun tipologi yang ada membuat air masih saja sulit diakses.

Hal ini membuat banyak pihak menaruh perhatian pada pulau ini. Bantuan berupa sarana prasarana air, akses dan konektivitas, literasi, pemberdayaan desa, pendidikan, gizi dan pangan, hingga program penguatan modal sosial lainnya terus digulirkan. Masyarakat dengan kesejahteraan rendah dapat dengan mudah ditemui dalam jangka waktu dan jarak yang tidak jauh dari perkotaan. Sayangnya hal ini sekaligus membentuk *mindset* atau pola pikir bahwa hidup apa adanya saja, pemerintah akan bantu mereka, apapun bentuknya. Masyarakat tampak akrab dengan “pendataan” dan mengharap ujungnya adalah “bantuan”. Hal inilah yang menjadi urgensi Regsosek di NTT, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Bentang Alam Tersulit, Tanpa Menyerah

“Yang kami pijak ini bukanlah tanah yang berkarang, melainkan karang yang bertanah”. Setidaknya begitulah narasi awal warga Timor tentang apa yang merepresentasikan wilayahnya. Terbayang banyaknya

bebatuan, tandusnya tanah, dan keringnya air, mencerminkan topografi Pulau Timor secara umum. Peneliti emik Regsosek tahun 2022 masuk ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Argumentasi yang mendasari pemilihan wilayah ini adalah tingginya angka kemiskinan dan *stunting* tidak hanya di Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di Indonesia (BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Pada Maret 2022, TTS menjadi salah satu tujuan lawatan Presiden RI Joko Widodo dengan tematik secara khusus melihat perkembangan penanganan *stunting* di desa rawan gizi. Pada hari ketika tim masuk Kabupaten TTS, Gubernur NTT Victor Laiskodat ternyata juga sedang mengumpulkan seluruh jajaran kepala daerah se-Provinsi NTT di TTS guna membahas penanganan *stunting*.

Konteks gizi buruk dan kemiskinan merupakan dua tema yang belum bisa lepas dari Provinsi NTT. Belum ada kabupaten atau kota di NTT yang masuk status prevalensi gizi biru atau hijau. Status gizi paling “baik” daerah di NTT masuk kategori “kuning”, yakni prevalensi 20% hingga 30%. Di antaranya di Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, dan Flores Timur. Artinya, 1 dari 5 anak di wilayah tersebut, mengalami gizi buruk. Selanjutnya, ada 15 wilayah lain yang masuk kategori “merah”, yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata, dan Malaka, di mana 1 dari 3 anak di wilayah ini mengalami *stunting*.

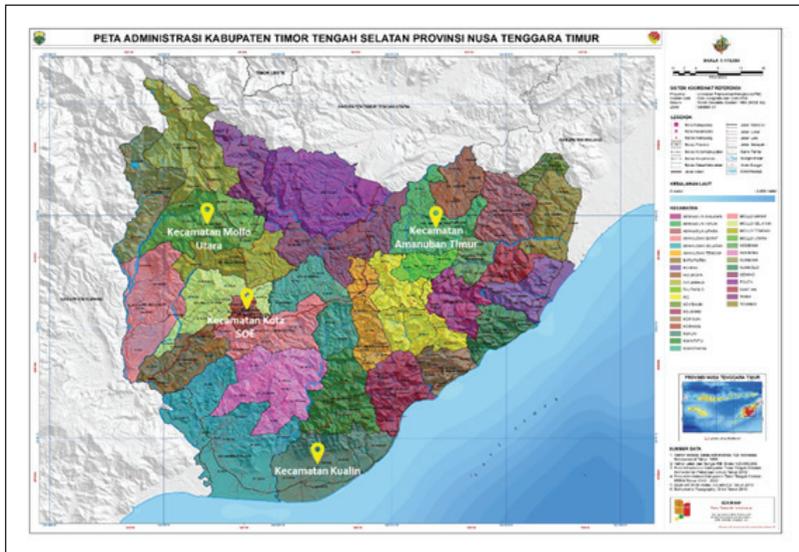
Adapun Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46% (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Khusus di Timor Tengah Selatan, angka prevalensinya menyentuh 48,3%, atau nyaris 1 dari 2 anak di kabupaten ini, *stunting* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Angka ini tertinggi secara nasional. Bagaimana *stunting* bisa terjadi tentu tidak lepas dari angka kemiskinan yang terjadi, keduanya saling terkait sebab akibat. Angka kemiskinan di NTT secara umum masih cukup tinggi. Timor Tengah

Selatan menjadi salah satu daerah dengan miskin ekstrem tertinggi dengan total 168.265 jiwa dengan kategori miskin ekstrem dari total 459.600 jiwa penduduk (BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2023; P3KE Kemenko PMK, 2023). Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten TTS menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk termiskin di Provinsi NTT dan masuk ke dalam 1 dari 214 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia (Adji dkk., 2022). Sanitasi layak juga baru tersedia pada 60% keluarga. Angka ini merupakan yang tertinggi di NTT.

Luas wilayah Timor Tengah Selatan, yang merupakan daerah terluas di Pulau Timor, menjadi salah satu kendala penanganan *stunting* dan kemiskinan. Dengan wilayah seluas itu, Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten peringkat tiga terendah kepadatan penduduk di NTT. Dalam konteks konektivitas, seluruh wilayah Timor Tengah Selatan dapat dicapai dengan darat. Namun, bentang alam yang terjal dan naik-turun membuat sebaran penduduk terpisah-pisah dan berjarak. Koneksi jalan yang baik sudah ada di Jalan Nasional Lintas Timor dan seputaran Kota Soe. Namun, selepas dari rutenya, jalan menjadi cukup terjal, masih berbatu, dan belum tersentuh pembangunan. Transportasi umum penghubung yang diandalkan masyarakat Timor Tengah Selatan adalah *travel*, bus, dan kendaraan pribadi. Masih banyak ditemukan juga masyarakat yang berjalan kaki untuk mencapai titik tertentu, baik karena alasan geografis (bentang yang menantang) maupun karena alasan ekonomis (tidak mampu membeli alat transportasi).

Tim masuk dalam tiga bentang alam yang merepresentasikan Kabupaten TTS, yakni pegunungan dengan curah hujan tinggi di utara, pegunungan dengan curah hujan rendah di tengah, dan daerah dataran rendah arah pantai di selatan. Secara umum, ketiganya terhubung dengan satu kata, pegunungan. Hal ini membuat Regsosek menjadi menantang karena jarak dan konektivitas satu desa dengan desa lain cukup jauh, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1, dan terjal. Bagi Petugas yang memang sebagian besar warga lokal, hal ini merupakan tantangan yang biasa saja, mereka dapat dengan mudah

Memotret TTS dari Utara, Tengah, dan Selatan



Sumber: Peta Tematik Indonesia, (t.t.)

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan

melaluinya. Secara umum, hal ini menunjukkan betapa konektivitas masih menjadi PR besar pemerintah setempat. Namun, rasanya Tuhan tetap saja adil. Rumah mereka banyak berjarak tetapi PPL banyak mendapatkan “target” SLS sejumlah 12–13 KK; tidak terlalu gemuk, tetapi cukup menguras keringat. Terlebih jika saat dikunjungi si empu rumah tidak ada, padahal sudah naik-turun menyusuri jalan terjal berbatu.

Sepanjang 26 kilometer (km) ke arah utara dari Kota Soe, di kanan jalan kita akan menemukan sebuah tugu bertuliskan “Selamat Datang Desa Bosen”. Desa ini merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Mollo Utara. 17 dari 18 desa di kecamatan ini masih bergantung pada kayu bakar untuk memasak. Jika pembaca ingat iklan sebuah perusahaan air minum yang memberikan bantuan sosial dengan jargon “sumber air su dekat” beberapa tahun yang lalu, bantuan sosial tersebut diberikan kepada Desa Binaus. Desa Bosen

hanya 4 km di utara desa tersebut. Jalan utama lintas utara Kota Soe cukup baik, dengan kerusakan aspal di beberapa titik. Sementara itu, jika masuk dalam Desa Bosen, kondisi jalan berbatu sudah sangat sulit untuk dilalui.

Desa Bosen memiliki kondisi wilayah dengan rumah-rumah warga yang tersebar di antara bukit dan sungai. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkau beberapa wilayah yang jauh dari pusat desa. Orang asli desa sudah terbiasa dengan kondisi ini dan cukup mudah bagi mereka untuk menjangkaunya. Sementara itu, bagi warga luar desa kondisi alam Desa Bosen menyulitkan untuk dijangkau dengan medan tanah berlumpur, perbukitan, dan melewati sungai. Jalan utama desa rusak parah. Luas Desa ini memiliki luas 8,9 km² dengan 1.618 penduduk (terpadat ketiga di Mollo Utara) dalam 8 RW dan 18 RT yang tersebar di seluruh Desa Bosen dalam tingkat kesulitan jangkauan yang berbeda. Kondisi cuaca di Desa Bosen khususnya dan Mollo Utara pada umumnya sering turun hujan karena wilayah ini tidak mengenal musim untuk turun hujan. Namun, topografi yang curam dan ekstrem membuat aliran air tidak merata. Dusun berada cukup tinggi di atas mata air sehingga perlu pompa air guna mengangkat air ke wilayah mereka.

Masyarakat di Desa Bosen menggantungkan hidup dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tanaman yang menjadi bahan pangan pokok di antaranya adalah jagung dan umbi-umbian. Ada pula sayur mayur yang menjadi bahan untuk konsumsi sehari-hari dan terkadang dijual ke pasar terdekat. Selain itu, ada beberapa program pemerintah, seperti PKH, BLT, dan pemberdayaan melalui pembagian bibit ayam untuk dipelihara dengan sistem bergulir antar warga desa. Terdapat juga program pemberdayaan lain, seperti penuturan Rifat Togar Matoto (32) Kaur Keuangan Desa, masyarakat juga mulai dikenalkan pembudidayaan lele. Bibit awal dan pakan disediakan pemerintah desa, sedangkan saat panen, 10% dari hasil panennya dikembalikan ke desa sebagai pendapatan asli desa.

Desa Bosen mewakili bentuk daerah utara TTS yang umumnya pegunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Namun, meski-

pun dengan curah hujan yang tinggi, kekeringan masih relevan sebagai isu di daerah ini karena memang secara umum daratan di pulau Timor adalah karang sehingga air sulit meresap ke dalam tanah, dan jika ada tanah untuk diolah, pastilah warga mengolahnya untuk kebutuhan pangan sehari-hari, seperti jagung dan ubi.

Jagung memang “menu” utama. Tidak hanya di Desa Bosen, di Mollo Utara, atau TTS, jagung merupakan komoditas andalan NTT. Data BPS menyebutkan bahwa TTS mampu memanen hingga 183.931 ton jagung, di mana hasil tersebut merupakan 25% dari jumlah panen jagung se-Provinsi NTT, yakni 750.166 ton (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Bahkan, NTT dicanangkan sebagai lumbung jagung nasional dan menjadi salah satu tulang punggung swasembada jagung, sebagai bagian dari pertahanan pangan di tengah gempuran jagung impor. Ironisnya, perdagangan jagung tidak dikuasai kaum pribumi. Selain faktor modal ekonomi, modal budaya juga mendukung terjadinya hal ini, di mana mayoritas petani lokal TTS akan menyimpan jagung untuk mereka sendiri, di lumbung mereka sendiri, sebagai cadangan makanan hingga satu tahun ke depan. Sebagian juga mereka siapkan untuk bibit tahun berikutnya. Bibit yang digunakan juga tidak selalu unggul, karena mereka tidak punya alokasi untuk biaya tambahan pembelian bibit, dan secara tradisi turun-temurun cara bertanam jagung adalah dengan menyisihkan hasil panennya untuk bibit tahun depan. Adapun bibit lain mungkin mereka akan tanam, namun dengan intervensi bantuan dari desa. Jika tidak, mereka cukup menanam kembali bibit yang ada. Meskipun demikian, memang sejatinya kualitas jagung NTT sudah cukup baik, rasanya khas, kenyal, dan mengenyangkan, serta ada sedikit rasa manis. Mayoritas penduduk setempat mulai menanam jagung ketika musim hujan tiba. Dengan kondisi iklim dan cuaca Pulau Timor yang bervariasi, warga Timor tidak serempak menanam jagung, menyesuaikan daerahnya sudah mulai hujan atau belum.

Hal yang sama juga terjadi pada penduduk Desa Oelet dan Mauleum. Kedua desa ini terletak di Kecamatan Amanuban Timur, kurang lebih 59 km dari pusat Kota Soe ke arah timur. Lepas dari

Trans Timor, menyusuri Jalan Ahmad Yani, Amanuban Timur, setidaknya ada dua jembatan kayu besar yang harus dilewati oleh warga Amanuban Timur sebagai akses mereka dari dan ke Kota Soe. Dalam konteks tahun 2022 ini, kedua jembatan yang membelah Sungai Benain dan anak sungainya itu tampak sudah tidak layak secara keamanan dan perlu diperbaiki, mengingat jembatan tersebut merupakan sendi utama konektivitas warga setempat.

Adapun Desa Oelet, yang berpenduduk 1.717 jiwa, terbagi atas 4 RW dan 13 RT. Secara umum, warga menggantungkan hidup dari berkebun. Seperti halnya daerah lain di TTS, sebagaimana disampaikan sebelumnya, komoditas yang kerap digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari adalah jagung dengan masa tanam yang ditentukan oleh datangnya musim penghujan. Sebagai sampingan pendapatan, ada dua komoditas yang bisa dijual oleh warga, yaitu buah asam dan kemiri, walaupun tidak sepanjang tahun berbuah. Asam, misalnya, hanya berbuah satu tahun sekali. Asam basah dijual Rp4.000,00 per kilo, jika cungkil bersih akan menjadi Rp10.000,00 per kilo. Asam ini seperti bonus bagi warga Oelet. Ibrahim Nase, Sekretaris Desa Oelet, menuturkan bahwa penjualan asam adalah bonus tahunan bagi warga sehingga apa yang menjadi keinginan warga, rata-rata baru tercapai setelah jual asam, entah renovasi rumah, beli baju, atau keperluan lainnya. *Papalele* (pedagang) berdatangan saat musim asam tiba.

Sulitnya akses jalan karena cenderung berbatu dan tidak bisa dilewati ketika hujan membuat warga terbiasa untuk berjalan jauh di jalanan yang terjal. Kemiskinan yang menjerat memaksa mereka untuk berjalan kaki karena membeli sepeda dayung (kayuh) saja tidak mampu. Selain kondisi alam dan konektivitas, budaya juga menjadi salah satu kendala pengentasan dari kemiskinan di Oelet. Masyarakat tidak terlalu memahami bagaimana cara mengelola keuangan, mengelola pangan, dan mendapatkan gizi seimbang. Pola pikir masyarakat sederhana, yaitu bagaimana kebun aman, hasilnya ditahan di lumbung untuk setahun, dan disisakan untuk tanam lagi. Padahal kebutuhan hidup tidak hanya pangan.

Isu lainnya adalah masih banyak warga yang belum terdata secara administratif kependudukan atau memiliki NIK. Hal ini sangat mendasar sehingga mereka tidak bisa mendapat akses tertentu, seperti sekolah gratis. Bahkan ada dalam satu keluarga yang 13 anggotanya tidak memiliki NIK. Terdapat beberapa suku dan agama di Oelet yang hidup rukun berdampingan sehingga dicanangkan sebagai Desa Pancasila oleh Koramil karena kemajemukan masyarakat dan menjadi salah satu desa dengan tingkat toleransi yang tinggi. Tim juga mencoba untuk menembus desa lain, masih dalam wilayah kecamatan Amanuban Timur, yakni Desa Mauleum. Desa ini juga tidak kalah kering, gersang, dan lebih tinggi secara topografi, sebuah komposisi yang tepat untuk mengerucut pada satu tema “kekeringan” sebagai isu utamanya. Selain itu, isu konektivitas tampak nyata menjadi catatan bersama, mengingat jalan desa ini sangat buruk dan tidak layak untuk kendaraan. Terdapat satu jembatan kayu lagi saat menyeberangi kawasan ini pun kondisi kayunya sudah memerlukan pergantian; beberapa lapuk dan patah sehingga jembatan berlubang.

Sambil membaca buku ini, jika pembaca dapat berselancar di mesin pencari dengan kata kunci “Desa Mauleum”, jawabannya adalah krisis air bersih yang telah dialami desa ini selama bertahun-tahun. Banyak program, wakaf, bantuan dari jemaat, dan bantuan pemerintah hadir di desa ini untuk menanggulangi krisis air yang terjadi. Mauleum terdiri dari 2.212 Jiwa dalam 6 RW dan 15 RT. Di desa inilah terletak satu dari empat pasar yang ada di Amanuban Timur, dengan konstruksi non-permanen. Alasan penduduk untuk hidup adalah kebun dan ternak, sedangkan yang muda, merantau ke luar negeri, luar pulau, atau ke Kota Soe. Jarak yang cukup jauh dari kota membuat desa ini cukup terisolir, meskipun memang ada banyak desa lain di TTS yang lebih *remote* dari ini. Kabar baiknya, jaringan internet sudah masuk desa ini. Bukan hal yang mengherankan ketika menemukan anak muda berselancar dengan gawai Android walau rumahnya sangat sederhana.

Tim mengikuti PPL yang akan melakukan verifikasi dan persiapan untuk masuk RT 13. Rumah Bapak RT tampak di seberang

rumah Kepala Desa; bukan terpisah oleh jalan, melainkan terpisah lembah. Untuk mencapainya, PPL harus turun gunung, lalu naik kembali sebelum masuk area lahan RT 13 tersebut, dengan sambutan gonggongan anjing tentunya. Dalam sebuah verifikasi pada RT 13 desa ini, Ketua RT, Timothius Tony, menyebutkan, hampir 20 nama lebih di luar daftar yang terdata oleh sistem. Meskipun kebenarannya akan ditelusuri saat pencacahan data dari rumah ke rumah, hal yang sama juga terjadi di desa lain yang ditemui. Batas RT yang terdapat pada sistem beberapa kali tidak sesuai dengan mutasi penduduk di lapangan.

Keadaan di atas menjadi salah satu titik kompleksitas data awal Regsosek, hal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu koordinasi antar PPL dan strategi PML untuk menyelesaikannya karena jika dibantah atau diputuskan saat verifikasi itu juga, tidak semua Ketua RT berkenan dengan jawaban yang mereka terima. PPL dalam hal ini harus bisa bijak dalam memutuskan dan mengakomodir pendapat RT, karena tentu lah ia ada “rasa memiliki” atas warga yang disebutkan tadi. Sedangkan dapat dipahami bahwa mobilitas penduduk desa pegunungan di TTS cukup tinggi. Pagi mereka berkebun, tidur malam di rumah lain, kadang tidur di rumah orang tuanya, kadang tidur di kebun, kadang tidur di rumah lainnya lagi, atau rumah saudaranya. Kondisi-kondisi seperti ini yang menjadi salah satu tantangan dalam pendataan.

Tantangan yang sama terjadi saat tim masuk Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin. Jarak desa ini 87 km dari arah barat daya Kota Soe, lalu ke selatan melalui Kecamatan Batu Putih dan Amanuban Selatan, ke timur dengan jalan berbatu masuk kecamatan Kualin hingga masuk Desa Nunusunu. Akses ke pantai di daerah ini cukup bagus, tetapi khusus akses ke pegunungan di desa ini rusak total. Di daerah Bena, Amanuban Selatan, hamparan sawah luas terbentang, 100 ha, menjadikan Bena sebagai salah satu penghasil beras di TTS. Wilayah ini cenderung datar, berbeda dengan wilayah lain di TTS. Di sisi selatan, tampak wilayah pesisir, dengan pantai Oetune sebagai salah satu andalan pariwisata lokal.

Secara medan, akses, dan fasilitas, wilayah ini masih jauh dari kata siap untuk menjadi destinasi wisata. Selanjutnya, naik ke arah pegunungan selama 30 menit dengan jalan berbatu, masuk desa Nunusunu. Jagung, kopra, asam, bawang, dan sayur menjadi komoditas andalan desa ini. Dengan kontur yang beragam, desa ini pun tidak lepas dari kekeringan. Baru pada tahun 2018 lalu dibangun instalasi air yang cukup baik, namun terbatas di dua RT. Penduduk di atas RT tersebut harus mengangkut air dengan jeriken sendiri. Terdiri dari empat dusun, satu dusun di desa ini harus membelah gunung untuk menjangkaunya. Dusun 04 ini juga sedang mengajukan pemekaran, mengingat luasan desa yang akhirnya membuat mereka terpinggirkan karena terpencil.

Dari lapangan, tim berusaha menangkap sisi Timor Tengah Selatan dari Utara (Mollo Utara), Selatan dan Barat (Amanuban selatan dan Kualin), Tengah (Soe), dan Timur (Amanuban Timur). Meskipun tidak berhasil menjangkau daerah *remote* seperti Suku Boti, dengan kendala cuaca hujan yang terjadi di setiap siang hari, setidaknya tulisan ini berusaha menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat TTS dalam sudut pandang sosial ekonomi, serta apa saja solusi yang perlu ditawarkan oleh pemerintah, baik pemerintah setempat, provinsi, maupun pusat.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Regsosek di TTS merupakan salah satu yang paling menantang di NTT. Di atas kertas, kecamatan di TTS adalah yang terbanyak sehingga memaksa BPS Kabupaten tidak hanya memaksimalkan petugas dari internal BPS, tetapi juga mitra hingga tingkat Koseka. Fakta ini ditambah dengan jumlah penduduk TTS yang merupakan terbanyak di NTT, 455.410 Jiwa. Sebaran penduduknya juga menantang, di mana kontur pegunungan dan lembah yang ada membuat permukiman menyebar cukup merata. Dalam sebagian SLS misalnya, hanya terdiri dari belasan KK, namun jarak tempuh antar rumah dan medan yang

tidak mudah membuat belasan KK yang seharusnya bisa dicacah dengan cepat ini harus menambah hari untuk menyelesaikannya.

Registrasi Sosial Ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masyarakat dengan kategori keluarga miskin dan sangat miskin. Hal ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat basis data keluarga (*by name by address*), mengingat di Provinsi NTT terdapat banyak wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem (salah satunya di Kabupaten TTS yang merupakan daerah kemiskinan ekstrem tertinggi di NTT). Dimulai pada bulan September tahun 2022, kegiatan Regsosek diawali dengan penetapan anggaran dan pelatihan-pelatihan untuk petugas pendata di lapangan. Ada beberapa tingkatan petugas yang melatih mulai dari tingkat nasional atau yang disebut Instruktur Nasional (Petugas dari BPS Provinsi dan kabupaten/kota) yang akan melatih di tingkat Provinsi dan Instruktur Daerah yang akan melakukan kegiatan pelatihan untuk petugas lapangan Regsosek. Ada tiga petugas lapangan yaitu Koordinator Sensus tingkat Kecamatan atau yang biasa disebut sebagai Koseka lalu ada Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang ada di tiap desa atau satuan lingkungan setempat.

Petugas mitra di TTS umumnya dipersyaratkan minimal berpendidikan SMA serta memiliki pengalaman pada kegiatan BPS sebelumnya. BPS memiliki preferensi untuk memilih mitra yang benar-benar tidak memiliki kesibukan lain karena Regsosek dilakukan selama satu bulan penuh saat pencacahan berlangsung. Satu hal detail tambahan dalam prasyarat ini adalah harus memiliki gawai Android. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam proses pelatihan dan pendataan di lapangan, serta *tagging* lokasi yang diperlukan. Sekitar 700-an lamaran masuk saat *open recruitment* dibuka, dan 100-an di antaranya terseleksi menjadi PML dan Koseka Mitra BPS. Pada rekrutmen kali ini, BPS TTS mendapatkan *talent* yang lebih banyak dari yang awal direncanakan. *Talent* ini kemudian diakomodasi sebagai PPL, namun ditugaskan di daerah yang padat, seperti Kota Soe, atau yang *remote* dan dirasa butuh beberapa PPL yang taktis, seperti Desa

Oelet. Selain itu, PPL biasanya merupakan orang asli dari desa tempat tinggal mereka untuk melakukan pendataan. Kehadiran orang "asli kampung sini alias *akamsi*" dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat proses kerja pencacahan. Beberapa desa menggunakan perangkat desanya langsung sebagai pencacah, seperti Yendry Aby, Kepala Dusun 04 Desa Nunusunu, Kualin, yang menjadi pencacah bagi warganya sendiri. Ada juga yang masih kerabat dari perangkat desa, seperti Vinsensius Tabun (20), pemuda yang baru lulus SMA dari Desa Oelet, Amanuban Timur.

Pada saat pelatihan, seluruh petugas lapangan, terutama untuk PPL, diberikan pelatihan untuk simulasi wawancara dengan menggunakan instrumen survei. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari. Hal ini untuk memastikan lancarnya pengisian lembar survei yang ada, termasuk kode-kode yang perlu dipahami masing-masing petugas, serta indikator lainnya. Jumlah pertanyaan yang cukup banyak dengan berbagai indikator isian, membuat PPL harus memastikan dirinya benar-benar menguasai kuesioner. Kepala BPS TTS, Patrisius Tupen, dalam pelatihan ini menekankan agar wawancara lebih natural, tidak kaku, karena sejatinya dengan melihat, atau bahkan sudah mengenal jika tetangga sendiri maka isian akan mudah selesai. Pelatihan juga dilakukan untuk memastikan proses di lapangan berjalan sesuai SOP.

Sebelum melakukan pendataan lapangan, Koseka bersama PML dan PPL melakukan kunjungan awal ke wilayah yang akan dijadikan lokasi survei. Mereka melakukan verifikasi data melalui perangkat setempat, seperti Kepala Desa, RW, dan RT, untuk memastikan bahwa keluarga yang akan disurvei jelas keberadaannya. Dalam proses ini juga petugas dan perangkat desa fokus mengondisikan warganya agar siap didata. Cuaca di TTS pada saat Regsosek sedang sering hujan. Masyarakat yang sebagian besar berkebun mulai ancap-anap untuk menanam jagung sehingga hanya ada dua pilihan, warga diimbau tidak ke berkebun saat hari PPL akan mencacah atau PPL mengalah dan mencacah di malam hari setelah warga pulang dari kebun.



Foto: Bilal (2022)

Gambar 2.2 Verifikasi data awal oleh PPL Timor Tengah Selatan

Dalam proses pendataan lapangan, PPL memiliki peran penting karena sebagai ujung tombak dalam memperoleh data yang valid. PPL bertugas untuk mengumpulkan data awal dan juga melakukan verifikasi atas temuan data lapangan langsung dengan masyarakat (Gambar 2.2) Sementara itu, Koseka dan PML memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh PPL. Pada tingkat provinsi, BPS memiliki sistem untuk memantau proses pelaksanaan survei Regsosek di tiap kabupaten. Setiap hari, BPS provinsi dapat memantau progres data yang dikirimkan petugas pendata sehingga semua wilayah dapat terpantau proses pendataannya dan teridentifikasi wilayah yang memiliki masalah-masalah teknis dalam proses pendataan.

Beberapa masalah teknis pada proses pendataan lapangan adalah kesulitan melakukan unggah *geotagging* dikarenakan akses sinyal yang sulit. Selain itu, masalah lainnya adalah kesulitan menemui responden di lapangan dikarenakan sedang bekerja. Beberapa kali permasalahan yang dapat mengganggu substansi dari proses Regsosek adalah kejenuhan masyarakat terhadap kegiatan survei. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa ketika ada survei maka akan ada bantuan yang

datang, ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan untuk meyakinkan responden dalam memberikan jawaban yang valid.

Terdapat kecenderungan di masyarakat yang menganggap adanya hubungan survei dengan mendapatkan bantuan. Mereka yang disurvei merasa mendapatkan bantuan setelahnya sehingga ketika mereka di survei mereka selalu menanyakan kapan akan mendapatkan bantuan. Akibatnya, ada kasus warga yang menjawab survei dengan “memiskinkan diri” atau tidak jujur pada aset yang dimiliki. Berbagai kendala dan tantangan akan dijabarkan dalam lanjutan tulisan ini. Untuk mengantisipasi hal ini, dalam survei Regsosek salah satu prosesnya adalah melakukan pengambilan foto rumah pada rumah tangga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin dan sangat miskin. Hal ini dilakukan untuk memastikan validasi data rumah tangga dengan kategori miskin dan sangat miskin, sedangkan untuk data *geotagging* dilakukan ke seluruh responden survei.

Saat tim KSDK masuk di Kabupaten TTS, data Regsosek sudah masuk 61%, di atas 100 SLS per PPL. Beberapa Koseka organik BPS sudah kembali ke kantor BPS untuk melakukan pekerjaan lain dan pemantauan hasil pencacahan. Seperti halnya yang terjadi di daerah lain, mereka fokus melakukan evaluasi pada awal-awal pencacahan, terutama pada 1–2 hari pertama dan minggu pertama di mana PPL, PML, dan Koseka sedang mencari ritme kerjanya masing-masing. Salah satu PPL Desa Bosen, Yonisam Liem (33), memilih untuk memulai langkahnya dari SLS yang jauh dan terjal terlebih dahulu. Ia mendapat tugas di 10 SLS. Menurutnya, lima di antaranya adalah SLS dengan medan yang sulit, dan lima lainnya tergolong mudah karena sederet dengan jalan desa, meskipun jalan desa ini terjal karena terdiri dari batu bersusun saja.

Koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat desa turut menentukan kelancaran proses Regsosek di masing-masing desa. Selain membantu pengondisian warganya, perangkat desa juga membantu memastikan masyarakat terdata sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Jika lancar, satu hari satu PPL di TTS rerata mampu menjangkau cacah 10 hingga 15 KK per hari, di mana mereka

dibebani rata-rata 250 KK per PPL. Angka ini tentu berbeda satu desa dengan desa lain, menyesuaikan sosial ekonomi setempat.

Banyak warga TTS, khususnya di kawasan pedesaan, menerima dengan baik kedatangan petugas. Setidaknya 3 (tiga) kemungkinan hal ini terjadi, pertama, sifat asli orang Timor yang memang ramah dan terbuka. Kedua, karena petugas PPL yang datang misalnya adalah tetangga sendiri sehingga ada unsur kedekatan. Atau ketiga, karena mengharap bantuan sebagai bagian tindak lanjut pendataan yang ada. Alasan pertama dan kedua tentu memudahkan, sedangkan alasan ketiga, akan membahayakan validitas data yang menjadi bias. Beberapa PPL yang baru melakukan survei, tampak canggung untuk bertanya, utamanya perihal pengeluaran keluarga. Sedangkan PPL yang sudah memiliki pengalaman sensus sebelumnya, tampak menguasai medan dengan berbagai siasatnya, seperti menyiapkan kertas dan menghitung item pengeluaran domestik rumah tangga satu demi satu, mulai dari berapa kali makan sehari dikali jumlah kepala, berapa minyak goreng dan beras dibeli dalam sebulan, dan seterusnya.

Bias perihal pengeluaran rumah tangga ini cukup besar dan variatif terjadi. Karena pendekatan sebagian besar warga pedesaan di TTS adalah sedang menerima pendataan dalam rangka akan mendapatkan “bantuan” maka mereka malu-malu untuk jujur terkait asetnya, baik lahan, kendaraan, maupun ternak dan perhiasan. Sebagian yang lain asal saja dalam menyebutkan pengeluaran makan dan minum, mengingat mereka merasa makan dari hasil olah lahan kebun sendiri, serta minum juga ambil secara gratis dari mata air atau tandon air setempat. Oleh karena itu, di akhir, setelah semua warga dalam satu desa tercacah, akan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP), di mana ketua SLS dan tokoh masyarakat setempat bersama fasilitator yang ditunjuk BPS akan mendiskusikan hasil pendataan yang telah dilakukan. Hal ini guna memastikan data per kepala apakah sudah sesuai dengan kondisi sejatinya menurut perangkat desa setempat. Hal ini direncanakan dilakukan *by name* sehingga keseluruhan data akan benar-benar mencerminkan apa yang ada di lapangan.

Detailnya pertanyaan dalam kuesioner Regsosek memunculkan optimisme dari pelaksana. Data yang ada diharapkan benar-benar masuk dengan valid, agar dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan-kebijakan serta program utama yang tepat bagi masyarakat. Oleh karena itu, validitas data sebagai refleksi situasi sosial ekonomi di lapangan berperan sangat vital. Setelah FKP, internal BPS juga akan melakukan *proxy mean test* guna mendapatkan angka yang lebih tepat dan kuat sebagai wujud penguatan data di tiap pelaksanaan pendataan. Bahkan, sekalipun direncanakan untuk diolah pada awal tahun depan, BPS Kabupaten telah mendapatkan instruksi dari BPS pusat terkait *proxy mean test* pada setidaknya 400 sampel data Regsosek, sekaligus sebagai upaya uji coba atas validitas data Regsosek ini secara nasional dalam tahun 2022. Salah satu hal lain yang menjadi tantangan PPL di lapangan adalah menguasai logika kode-kode kuesioner dengan lebih cepat. Beberapa PPL perlu 3–4 hari kerja untuk mulai terbiasa dengan kode-kode ini. Makin sering mereka melakukan pencacahan makin terbiasa pula dengan kode-kode yang ada sehingga makin lama durasi pencacahan tiap SLS makin cepat. Dari yang awalnya perlu 30–60 menit per SLS, menjadi 15–20 menit pada tiap SLS yang dikunjungi. Hal ini tentu menyesuaikan juga pada berapa individu dalam satu KK di tiap rumahnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki penduduk miskin dan miskin ekstrem dengan jumlah yang besar secara nasional, warga TTS akrab dengan “bantuan”. Hal ini dapat dengan mudah dilihat, terutama di luar kecamatan Kota Soe. Sepanjang jalan pedesaan, kita dengan mudah menemukan tandon-tandon air hasil bantuan, baik dari pemerintah, NGO, wakaf, maupun jemaat gereja tertentu. Pada hari tertentu, ibu hamil dikumpulkan di kantor desa untuk makan bersama guna mencegah *stunting*. Hingga rumah warga yang tampak baru dibangun dengan keseragaman yang cukup mencolok karena

berasal dari dana desa, ataupun bantuan bedah rumah dari sumber donor lainnya. Namun, patutlah disadari bersama bahwa tidak semua bantuan berdampak baik bagi warga. Beberapa bantuan justru membentuk psikologis warga menjadi mental “pengemis”, menolak bekerja keras karena merasa hidupnya sudah “ditanggung”, sekolah dan gizi anaknya sudah “diurus”, dan perutnya sudah “dicukupi” bantuan.

Bantuan yang ada tentu datang dengan pendataan sebagai awalnya. Selain persoalan mental, masalah “angka” yang sudah ada juga menjadi tumpang tindih. Pada tahun 2022 ini saja, BPS sudah mendata mereka pada sensus penduduk lanjutan. Selain dari BPS, mereka juga telah mendapat pendataan SDGs, yang menurut beberapa warga yang ditemui, poin pertanyaan dalam kuesioner tidak jauh berbeda dengan poin pertanyaan Regsosek ini. Terdapat juga survei dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan lain lain. Hal ini membuat masyarakat pedesaan di TTS sangat akrab dengan pendataan. Bahkan petugas yang melakukan sebagian adalah orang yang sama. Meskipun hasil akhirnya kadang tidak berkorelasi, seperti hasil angka kemiskinan dari dinas sosial misalnya, berbeda dengan hasil survei kecukupan gizi (survei *stunting*), di TTS sendiri tidak memunculkan keterikatan sebagaimana yang dinarasikan oleh publik kebanyakan. Isu-isu ini membuat keberadaan Regsosek menjadi penting sebagai awal pendataan yang terintegrasi, dalam satu data, satu metode dan validitas yang sama, dengan objek data per kepala dan *by name by address* sehingga diharapkan data yang dihasilkan valid.

Tantangan yang kerap kali terjadi pada PPL adalah sulitnya menemukan waktu untuk menemukan responden. Hal ini beberapa kali diakui oleh PPL karena pada waktu PPL turun ke lapangan sering kali bertepatan dengan waktu bekerja warga yang menjadi responden Regsosek. Walaupun demikian, PPL memiliki caranya tersendiri untuk mengatasi kendala ini. Beberapa PPL meminta kepada ketua RT untuk melakukan pemberitahuan kepada warganya. Selain itu, PPL biasa memberitahukan kepada anggota keluarga lain ataupun tetangga yang ditemuinya untuk disampaikan kepada calon responden. Pendekatan

ini terbukti ampuh di banyak titik. Banyak warga menurut dengan pemberitahuan dari perangkat desa setempat. Sekali lagi, karena mereka enggan namanya terlewat jika ada “bantuan”.

Paradigma Regsosek yang berpancang pada kartu keluarga berbeda dengan pola pikir sensus yang berdasar pada rumah tangga. Hal ini membuat petugas pada awal kegiatan pendataan Regsosek kesulitan untuk memahami teknis pengisian kuesioner dan ketentuan survei untuk keluarga (bukan rumah tangga). Warga pun, hingga tulisan ini disusun di tengah Regsosek berjalan, tidak semua menerima dirinya didata di lokasi tempat ia bertemu petugas, khususnya bagi mereka yang masih berpindah-pindah tempat tinggal, misalnya karena lahan kebunnya berbeda lokasi, kerabat yang berbeda tempat, atau masih tinggal dengan orang tua. Rata-rata mereka tidak mau kehilangan status administratifnya di tempat lama, dan takut jika data ini nanti digunakan sebagai justifikasi perpindahan administratif ke lokasi baru tempat ia didata dalam Regsosek. Maklum, jarak dari desa menuju pusat Kota Soe untuk mengubah data administratif cukup jauh. Jika tanpa keperluan lain maka bagi banyak warga desa akan memakan biaya dan waktu. Selain itu, hal-hal teknis administratif seperti ini adalah hal yang sulit bagi mereka. Oleh karena itu, tidak jarang di lapangan petugas menemukan warga tanpa NIK yang valid. Sejatinya ini adalah salah satu luaran temuan yang bagus dari Regsosek. Warga tanpa NIK telah dengan sendirinya teridentifikasi. Tinggal bagaimana Dinas Pencatatan Sipil setempat merespons hal ini kemudian, serta menjemput bola untuk mendata NIK warganya. NIK dan KTP adalah kebutuhan yang sangat mendasar sebagai warga negara karena segala hal administratif akan memerlukannya.

Regsosek TTS: Alur Pendataan di Lapangan

Sebelum PPL memulai kegiatan pendataan dari pintu ke pintu, verifikasi data responden perlu dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan RT/Kepala Satuan Lingkungan Setempat. Pemadanan data ini dilakukan untuk memudahkan PPL yang akan menjangkau responden. Beberapa aktivitas verifikasi ini antara lain, menentukan

apakah keluarga memiliki kategori sangat miskin, miskin, atau tidak miskin. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan keberadaan warga (hidup atau sudah meninggal), dan yang terakhir adalah untuk memastikan warga yang tidak ada dalam data awal yang dibagikan kepada PPL. Untuk warga yang belum masuk ke dalam *pre list* atau data awal ini akan dimasukkan ke dalam tabel terpisah untuk dicatat dan akan menjadi tambahan responden yang akan diwawancarai oleh PPL.

Setelah PPL memastikan data responden telah sesuai dan terverifikasi oleh bapak ketua RT, langkah selanjutnya yang dilakukan PPL adalah mengunjungi rumah responden satu persatu untuk melakukan wawancara. Selain wawancara dengan kuesioner, PPL juga melakukan pendataan penitikan lokasi rumah responden dan dokumentasi rumah responden dengan kategori sangat miskin dan miskin. Beberapa dokumentasi kondisi rumah yang perlu dipotret adalah kondisi depan rumah, atap, lantai, serta kondisi MCK. Ini untuk memastikan bahwa kondisi responden tersebut memang tergolong warga dengan kategori miskin dan sangat miskin.

Proses wawancara yang dilakukan oleh PPL rata-rata memakan waktu antara 15 menit hingga 1 jam tergantung kondisi responden yang ditemui. Beberapa pertanyaan yang memakan waktu PPL untuk menuliskan jawabannya adalah pada bagian pencatatan nomor kependudukan, penghasilan, serta pengeluaran. Untuk pencatatan nomor kependudukan misalnya, apabila sedikit maka cenderung cepat, akan tetapi pada kondisi responden dengan 13 anak maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menuliskannya secara tepat.

Setelah proses wawancara selesai dilakukan PPL, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengumpulan hasil isian kuesioner untuk diperiksa kembali oleh PML. Dalam proses inilah kondisi validitas data ditentukan, karena PML memastikan bahwa isian data PPL merupakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang mendorong PML untuk terus memantau dan memastikan PPL di bawahnya untuk bekerja dengan baik dan benar serta jujur. Di beberapa tempat, PML bahkan mengingat di lokasi pendataan,

meskipun dia bukan warga setempat. Hal ini untuk memudahkan pemantauan serta verifikasi kuesioner. Untuk wilayah di Timor Tengah Selatan dengan bentangan alam yang beragam dan banyak desa yang sulit diakses dari luar kerja seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan PML yang berasal dari luar wilayah desa.

Setelah proses pengecekan kuesioner selesai dilakukan oleh PML, selanjutnya PML akan menyerahkan kumpulan isian data kuesioner kepada Koordinator Kecamatan (Koseka). Koseka akan melakukan pengecekan akhir sebelum data isian diserahkan kepada BPS kabupaten untuk dilakukan input data ke dalam komputer. Proses pengecekan berjenjang ini dilakukan untuk memastikan kembali isian data telah benar dan dapat diinput. Peran Koseka sebagai penanggung jawab kegiatan Regsosek di lapangan memiliki tanggung jawab yang besar. Selain untuk memastikan validitas data, Koseka juga memiliki peran untuk pengawasan baik teknis maupun non-teknis dalam proses pendataan lapangan. Pada posisi ini, pengetahuan Koseka baik mengenai kondisi lapangan maupun kualitas data sangat diperlukan untuk memastikan proses pencatatan data dapat terlaksana dengan baik.

Setelah semua proses pencatatan data lapangan Regsosek selesai, selanjutnya adalah proses input data yang akan dilakukan oleh petugas BPS kabupaten. Penginputan data inilah yang akan menyita banyak waktu sehingga di kabupaten, proses ini akan terbagi dalam dua termin, yaitu pada proses percepatan penginputan data pada mulai bulan November hingga Desember, dan sisanya akan dilakukan pada tahun depan atau tahun 2023.

Pada kasus kesulitan teknis pengisian kuesioner, seperti cara pengisian dan pemahaman atas pertanyaan, terjadi karena beberapa PPL baru memiliki pengalaman terlibat dalam proses pendataan sosial ekonomi di lapangan. Selain itu, pada 3 hari awal pelaksanaan kegiatan Regsosek PPL belum diberitahukan untuk wajib mendata pengeluaran tiap responden sehingga pada awal pencatatan jumlah pengeluaran responden belum ada yang tercatat. Sementara itu, pada kasus pemahaman PPL mengenai ketentuan survei Regsosek

adalah kejadian dalam satu rumah tangga dengan 2 keluarga atau lebih ternyata hanya satu saja yang di wawancara. Padahal dalam ketentuannya, survei Regsosek ini menghendaki pencatatan data lapangan pada setiap keluarga dengan responden Kepala Keluarga. Karena itu, pada beberapa kasus tersebut, Koseka melalui PML mengingatkan PPL untuk kembali melakukan wawancara kepada keluarga tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan survei.

Hal-hal teknis tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan memaksimalkan proses pelatihan PPL sebelum terjun langsung melakukan pendataan di lapangan. Sekali lagi, karena PPL merupakan ujung tombak pencatatan data sosial ekonomi masyarakat yang akan digunakan dalam proses penyusunan Satu Data Indonesia, agar nantinya tidak ada lagi kata tidak tepat sasaran, tumpang tindih, ketidaksesuaian data kemiskinan, dan lain sebagainya terkait persoalan data nasional masyarakat di Indonesia.

Cerita menarik, beberapa keluarga dengan cacah anggota yang banyak, ada 13 orang, 11 orang, memaksa PPL mengeluarkan hingga 3 lembar kuesioner, dan memaksa PMLnya untuk ke kota mengambil kekurangan kuesioner yang ada. Setidaknya ada 2 hal yang bisa disimak dalam hal ini, yaitu pertama memang pengetahuan akan keluarga berencana (KB) di desa wilayah TTS yang masih sangat kurang. Kedua, budaya setempat yang memang terbiasa memiliki anak yang banyak karena bagi mereka anak adalah hadiah dari Tuhan, dan Tuhan akan memelihara mereka. Begitulah keyakinannya. Faktanya, anak mereka hanya disekolahkan hingga SD atau SMP, lalu menjadi kawan orang tuanya berkebun atau bekerja meskipun masih di bawah umur. Sebagian orang tua, menurut penuturan setempat, lebih suka membeli rokok atau pesta, dari pada membelikan bahan makanan bergizi untuk anaknya. Sebuah budaya yang perlu dobrakan bersama dari setiap penjuru unsur kesejahteraan masyarakat, baik dinas setempat, provinsi, maupun pusat.

Isu lain yang terangkat dalam konteks pendataan adalah penambahan aplikasi “*Regsosek khusus*” untuk pendokumentasian rumah

warga dengan kategori miskin dan sangat miskin. Penggantian aplikasi ini tentu saja memberikan masalah tersendiri bagi petugas lapangan yang sedang bekerja. Di tengah proses mereka melakukan pendataan terdapat pemberitahuan penggantian aplikasi ini sehingga pada beberapa lokasi yang sulit sinyal menjadi terlambat informasinya dan mereka merasa resah apakah data yang mereka input perlu diulangi. Mengingat kondisi sebaran wilayah responden yang berjauhan tentu membuat PPL berpikir 2 kali jika harus mengulanginya. Ini yang seharusnya menjadi catatan penting, meskipun nantinya ada kelonggaran untuk penggunaan aplikasi baru. Namun, permasalahan teknis seperti ini sangat menyulitkan pada wilayah-wilayah dengan topografi seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan perbukitan dan akses jalan yang beraneka ragam, baik melalui sungai, bukit, maupun jalan berbatu yang tentu saja menanjak dan menurun.

Selain beberapa kendala teknis yang terjadi, ada beberapa kendala non-teknis dalam proses pendataan registrasi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi substansi dan validitas data yang didapatkan. Beberapa hal ini di antaranya, kesulitan PPL untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh responden dan kesulitan PPL dalam mengetahui pengeluaran yang dikeluarkan oleh responden dalam satu bulan terakhir. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, masalah kesulitan dalam mendapatkan informasi aset yang dimiliki responden disebabkan oleh keengganan responden yang tidak ingin dianggap sebagai orang kaya karena memiliki aset seperti hewan ternak ataupun perhiasan emas. Banyak warga yang berpendapat proses pendataan ini berkaitan secara langsung dengan pendataan bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah sehingga mereka akhirnya khawatir jika aset mereka disebutkan nantinya tidak dapat bantuan dari pemerintah. Beberapa cara yang dilakukan oleh PPL untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengecekan sendiri di sekitar rumah responden atau dengan bertanya kepada tetangganya untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh responden terkait. Namun demikian, hal ini tentu saja tidak dapat memotret secara tepat jumlah aset yang dimiliki, karena di TTS sen-

diri di beberapa wilayah misalnya ada warga yang memiliki ternak yang dilepas di tengah hutan dan tidak dipelihara di rumah. PPL memiliki keterbatasan waktu maupun akses untuk menjangkau maupun memastikan terjawabnya pertanyaan mengenai aset tersebut.

Kedua, persoalan sulitnya mencatat pengeluaran responden Regsosek. Meskipun demikian, dalam daftar pertanyaan kuesioner Regsosek tidak memuat pertanyaan mengenai pengeluaran responden, namun wajib untuk ditanyakan dan jawabannya dimasukkan ke dalam kolom catatan. Ada setidaknya dua bagian pengeluaran yang harus diidentifikasi oleh PPL, yang pertama adalah pengeluaran makanan dan yang kedua adalah non-makanan. Kesulitan yang sering ditemui adalah ketidaktahuan responden mengenai jumlah pengeluaran, misalnya jika responden ditanya berapa pengeluaran untuk makanan dalam sebulan, beberapa responden menjawab kalau apa yang mereka konsumsi adalah yang mereka tanam (hasil tani subsistem). Tentu saja hal ini membingungkan PPL maupun responden.

Selanjutnya, untuk pengeluaran non-makanan, baik PPL maupun responden harus secara detail menanyakan apa saja yang dibeli dalam sebulan. Sebagai contoh, berapa uang untuk membeli sabun dan membeli pulsa. Hal inilah yang cukup memakan waktu, karena PPL harus menghitungnya sendiri, dengan catatan apa yang disampaikan oleh responden sifatnya hanya pengakuan saja tanpa bisa diverifikasi secara tepat jumlah pengeluaran tersebut. Penggunaan *blocknote* juga digunakan untuk mencatat detail pengeluaran SLS, seperti yang dilakukan Yonisam Liem di Bosen dan terbukti ampuh untuk mengorek data pengeluaran warga setempat.

Kendala-kendala yang ditemui di lapangan tersebut setidaknya harus menjadi sebuah catatan penting untuk meningkatkan kualitas perolehan data lapangan. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, kendala adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, namun bisa diperbaiki. Baik sisi manajerial maupun teknis di lapangan sama-sama memiliki porsi tersendiri untuk terus memperbaiki proses kegiatan Regsosek.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Di luar kendala yang ada, pemerintah desa di TTS pada umumnya memahami Regsosek dengan baik. Dengan dilibatkannya perangkat desa sebagai verifikator, pendamping, sekaligus menjadi bagian dari konsultasi publik, membuat mereka tampaknya memahami apa yang sedang BPS setempat lakukan. Di titik-titik dimana tim masuk dan mendalami proses yang ada, perangkat desa secara aktif terlibat. Bahkan beberapa melibatkan dirinya sendiri, atau kerabatnya sebagai bagian dari upaya percepatan Regsosek. Meskipun demikian, hal ini juga menjadi pisau bermata dua.

Di satu sisi, PPL dari desa sendiri pasti sangat menguasai medan, tetapi di sisi lain, kedekatan mereka dengan lingkungan membuat mereka sulit untuk tidak mengakomodir apa yang disampaikan oleh responden. Misalnya, memaksa untuk ditulis “miskin” atau berani untuk tidak menyebutkan asetnya. Sejatinya, perangkat desa pun sudah mengimbau untuk sejujurnya terbuka kepada petugas, seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Oelet Ibrahim Nase, maupun Kaur Keuangan Desa Bosen Rifat Togar Matoto, serta Sekretaris Desa Nunusunu, Yunus Babys. Di Nunusunu misalnya, Kadus 04 Yendri Aby sekaligus menjadi PPL di dusunnya sendiri. Alasan akses yang jauh dan terjal membuat tim tidak dapat mengkonfirmasi bagaimana progress yang dilakukan Yendri, tetapi pendataan di Nunusunu berjalan lancar, mengingat medannya sejatinya cukup terjal.

Medan pedesaan TTS yang menantang membuat masing-masing Koseka, PML dan PPL harus pandai bersiasat dengan medan dan bebannya sendiri. Di Bosen, Yonisam Liem memulai di SLS yang menurutnya jauh dan terjal sehinggalakira-kira sudah menyelesaikan 50% pekerjaannya. 50% lainnya tinggal rumah-rumah di kanan kiri jalan utama desa, lebih mudah baginya. Pelaksanaan pencacahan Regsosek di Bosen sudah berjalan selama setengah bulan sejak 15 Oktober. Mekanisme yang dijalankan hampir sama dengan wilayah lain yang menggunakan sistem berjenjang baik untuk pelaporan maupun pengawasan. Proses pendataan dilakukan secara manual

menggunakan kuesioner yang dibagikan dari BPS Kabupaten TTS. Kuesioner yang telah dicetak dibagikan kepada seluruh Koseka untuk disebar kembali kepada PML dan berakhir di PPL sebagai ujung tombak pendata data sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan pendataan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara serempak oleh semua PPL di SLS masing-masing yang telah dibagi oleh PML. Di Bosen sendiri, seluruh PPL merupakan warga asli desa yang perekrutannya berdasarkan rekomendasi kepala desa. Penunjukan warga asli sebagai PPL sangat memudahkan kerja pendataan di lapangan dengan medan yang sulit dijangkau. Beberapa kali PPL ditemani oleh bapak ketua RT setempat untuk mengunjungi warga yang akan didata. Saat ditemui Tim, PPL didampingi kaur keuangan desa, karena ketua RT yang bersangkutan sedang memperbaiki saluran air setempat.

Selain topografi, salah satu hambatan pendataan adalah sulitnya akses jalan. Desa Oelet misalnya, mungkin 2 jam dari Soe, namun di jalur desanya jalan rusak dan sulit. 2 dari 3 PPL Oelet adalah warga Soe, dan PMLnya, Aris (32), juga dari Kota Soe. Mereka memutuskan untuk menginap di lokasi pendataan, di rumah Vinsen, satu-satunya PPL "*akamsi*". Mereka mulai melakukan kegiatan pendataan Regsosek sejak tanggal 15 Oktober. Kendala bahasa menjadi faktor berikutnya, dimana PPL di TTS akan sangat dimudahkan jika memahami dan mampu menggunakan bahasa Dawan. Masyarakat desa kurang familiar dan kurang nyaman dengan bahasa Indonesia, terutama keluarga yang terpencil dan jauh dari pusat desa. Yandri, PML Desa Billa, dengan fasih membantu komunikasi dengan warga setempat, baik saat di Desa Oelet maupun di Desa Mauleum. Penerimaan warga saat petugas menggunakan bahasa Dawan sangat berbeda, mereka tampak menjadi nyaman dan akrab dengan bahasa tersebut.

Sementara itu, di wilayah lain, kecenderungan bentang alam yang sama terdapat di wilayah Suku Boti, wilayah dengan masyarakat adat yang masih kental di Desa Boti Kecamatan Kie. Warga Desa Boti, seperti banyak suku lain yang masih kental kesukuannya, masih mempertahankan nilai-nilai adat yang kental seperti penganut ke-

percayaan dan menghindari masuknya peradaban luar yang bisa merusak tatanan kebudayaan warga Boti. Salah satunya adalah listrik yang tidak dapat masuk ke beberapa tempat karena warga Boti masih ingin suasana di desa mereka masih sama dan tetap terjaga seperti dahulu. Bantuan yang masuk ke Desa Boti ini pun tidak banyak, hanya BLT desa saja yang ada sementara ini.

Proses pendataan awal Regsosek di Boti tidak jauh berbeda dengan desa lain. Pendataan di wilayah ini terbagi ke dalam 19 SLS dengan pembagian tugas pendataan oleh 3 orang PPL dengan 1 PML, dengan 2 PPL asli warga Desa Boti dan 1 PPL serta PML dari luar yang menginap di Desa Boti. Sejauh ini masyarakat Boti menerima kegiatan pendataan Regsosek. Meskipun demikian, kendala yang dialami di Desa Boti ini tidak berbeda dengan kendala-kendala yang ditemui di desa lain yaitu, kondisi medan pendataan yang berat karena hujan serta kesulitan untuk menemui responden karena sedang berkeburun. Waktu pelaksanaan pendataan yang bertepatan dengan waktu tanam membuat PPL kesulitan untuk mencari masyarakat pada jam-jam kerja, yaitu pagi dan siang hari. Namun demikian, menurut Koseka di Kecamatan Kie, melalui pendataan Regsosek ini diharapkan warga di Desa Boti dapat tercatat dengan benar terkait keluarga dengan kategori miskin dan sangat miskin. Walaupun selama ini di Desa Boti ada bantuan yang sementara ini masuk, yaitu BLT desa yang turut membantu warga desa dengan kategori miskin dan sangat miskin.

F. Kesulitan Kami Bukan Hambatan bagi Mereka: Profil Pendata Lapangan

“...lokasi responden ada di balik gunung itu..”

“...di musim tanam seperti saat ini,
kami kesulitan untuk menemui responden...”

“...di seberang kali itu tempat tinggal ketua RT...”

“...kalau kita terlambat melalui jalan bukit itu,
kita tidak bisa pulang karena banjir dan jalur yang licin...”

Demikianlah beberapa percakapan yang terdengar saat turun menuju lokasi pendataan awal Regsosek. Selain itu, kontur wilayah dengan kondisi berbatu menanjak, berada di perbukitan, serta sungai, cuaca yang tak menentu seperti panas yang sangat terik lalu tiba-tiba turun hujan juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, tidak ada keluhan yang tergambar dari wajah para petugas lapangan yang ditemui, mulai dari Koseka, PML, hingga PPL yang setiap hari harus melalui medan dan cuaca yang menantang dan sangat sulit untuk orang yang berasal dari luar daerah TTS. Gambaran mengenai kontur lokasi terlihat dari Gambar 2.3, di mana jalan masih berupa tanah dan berada di wilayah perbukitan.

Adelbertus Muti atau Aris merupakan salah satu PML di Desa Oelet. Bertempat tinggal Kota Soe, Aris turut mendaftar untuk menjadi PML pada kegiatan Regsosek di Kabupaten TTS. Aris mendapatkan tugas untuk menjadi PML di Desa Oelet yang berjarak kurang lebih 45 km dari tempat tinggalnya. Jarak yang cukup jauh dengan tanggung jawab lapangan yang harus dilakukan membuat Aris memutuskan untuk tinggal di Desa Oelet bersama dengan PPL di satu rumah. Ini dilakukan karena menempuh jarak Soe–Oelet cukup memakan waktu dan melelahkan jika dilakukan pulang-pergi setiap hari.

Aris sebagai PML memiliki tanggung jawab terhadap tiga PPL di bawahnya yang setiap hari tidak mengenal libur melakukan pendataan lapangan, baik siang maupun malam. Setiap hari, Aris melakukan pengecekan hasil isian kuesioner PPL yang telah melakukan wawancara untuk nantinya diserahkan kepada Koseka di Soe, di mana Koseka Amanuban Timur, Sisca Rianty, juga merupakan tim organik BPS sehingga lebih banyak berkulat pada pekerjaan domestik BPS kabupaten. Selain melakukan pemeriksaan kuesioner, dia juga membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh PPL, seperti kendala izin ketua RT, masalah responden sulit ditemui, hingga pengecekan data *pre-list* yang diverifikasi bersama dengan ketua RT.

Sebelumnya, Aris sudah beberapa kali bermitra dengan BPS Kabupaten TTS sehingga dia sedikit banyak mengetahui kegiatan-kegiatan survei sebelumnya dengan BPS. Menurut Aris sendiri ke-



Foto: Gustaf, 2022

Gambar 2.3 PML dan PPL menjangkau wilayah yang sangat luas dan kontur berbukit.

giatan Regsosek ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak jauh berbeda dengan survei sebelumnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), namun perbedaannya adalah Regsosek ini sifatnya sensus yang berbeda dengan survei sebelumnya yang hanya mengambil sampel saja. Model ini seperti mengulang kegiatan sensus penduduk tetapi dengan pertanyaan yang lebih sedikit dan mudah dipahami. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Regsosek ini, wawancara dilakukan dengan bahasa daerah untuk melakukan *probing* kepada responden karena rata-rata responden lebih mudah memahami pertanyaan dengan menggunakan bahasa setempat.

BPS sengaja melakukan sistem perekrutan untuk posisi PML karena dibutuhkan kriteria khusus untuk melakukan pemantauan maupun pemeriksaan kuesioner. Pemahaman tentang isian kuesioner

serta cara mengatasi kendala lapangan membutuhkan respons yang cepat karena waktu untuk melakukan pendataan juga hanya dalam sebulan dengan masing-masing target responden per PPL sekitar 250 responden. Jumlah ini dapat lebih karena bisa saja di lapangan ada tambahan responden yang belum tercatat sehingga perlu strategi yang tepat di lapangan melalui kerja sama antara Koseka, PML, dan PPL.

Aris sebagai PML sendiri melakukan strategi yang tepat untuk memudahkan kegiatan Regsosek di lapangan dengan medan yang sulit. Hal pertama yang dilakukannya adalah memutuskan untuk menginap di desa atau lokasi tempatnya bekerja. Lalu yang kedua berusaha untuk membangun kerja sama dengan kepala desa, kepala dusun, dan ketua RT untuk sebagai sarana penyambung lidah ke warga yang akan didatangi untuk diwawancara. Yang menarik adalah pada kasus tertentu, misalnya saat verifikasi data dengan ketua RT lalu ditemukan pendataan warga yang dobel karena ketua RT tidak mau warganya dilepas ke RT lain, Aris melakukan penyesuaian data langsung di lapangan tanpa berdebat dengan ketua lingkungan setempat. *Gesture* seperti ini menjadi penting mengingat ketua RT merupakan pihak yang harus dijaga hubungannya untuk memudahkan proses pengumpulan data Regsosek di wilayahnya. Strategi-strategi untuk menghindari konflik seperti ini perlu dilakukan dengan menyelesaikan masalahnya dengan cara berkoordinasi dan kunjungan langsung ke responden bersama seluruh PPL di bawahnya.

Cerita lain datang dari Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara. Lokasi desa ini kurang lebih 22 km di utara pusat kota. Wilayah ini memiliki topologi perbukitan dengan pohon dan hamparan rerumputan yang luas. Andriyani (32) merupakan Koseka Mitra di Kecamatan Mollo Utara. Sama dengan Aris, Andriyani adalah warga Kota Soe, namun Andriyani tidak menginap di desa lokasi pencacahan. Setiap hari, ia menjangkau Desa Bosen pulang-pergi menggunakan motor. Andriyani sebelumnya menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan pada tahun 2017. Menarik mendengar cerita Andriyani mengenai pendidikan dan pekerjaan yang menurutnya memiliki tantangan tersendiri ketika “*balik kampung*” ke NTT.

Sesudah menyelesaikan pendidikannya, Andriyani tidak bisa langsung bekerja di NTT. Kalaupun ada pekerjaan untuknya, bayaran yang diterima juga kecil dan sering kali hanya menjadi sukarelawan saja. Itulah mengapa Andriyani tertarik untuk ikut kegiatan Regsosek dan bermitra dengan BPS karena selain memiliki upah yang jelas, dia juga dapat mengisi waktu luang karena saat ini sedang tidak bekerja. Sama dengan Koseka lain di Kabupaten TTS, Andriyani menjadi pengatur di lapangan untuk kegiatan Regsosek di Mollo Utara. Dia mengumpulkan kuesioner, pemeriksaan akhir, dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh petugas lapangan lain di bawahnya. Tentu saja hal ini memiliki tantangan tersendiri karena dengan cakupan wilayah yang sangat luas, Mollo Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki dua Koseka, salah satunya Andriyani. Meskipun seorang perempuan, hal ini tidak menjadi halangan bagi Andriyani untuk menjangkau wilayah kerjanya. Hanya saja ia mengaku terkadang merasa ngeri juga jika harus pulang terlalu larut dan melewati hutan mahoni di seputaran Jalur Kapan—Soe. Namun, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan jalan yang cukup baik, pulang-pergi Soe—Mollo Utara memungkinkan untuknya.

Di desa Bosen, ada Oyisam Liem atau Om Sam yang merupakan PPL Regsosek setempat. Ia sebelumnya bekerja sebagai petani sawit di Kalimantan. Setelah kurang lebih 10 tahun merantau, Om Sam akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya karena sudah bisa membangun rumah dan membeli motor. Ia kini menjadi kepala keluarga dengan tiga anak. Di sela kegiatan berkebunnya di desa, Om Sam adalah salah satu yang direkomendasikan kepala desa untuk menjadi PPL pada kegiatan Regsosek ini. Sebelum Regsosek, Om Sam juga sempat menjadi petugas pendataan lapangan BPS pada sensus 2010 sehingga tidak mengherankan dirinya ditunjuk sebagai petugas lapangan Regsosek. Selain karena merupakan warga asli, dirinya juga telah memiliki pengalaman sebagai petugas pendata lapangan. Caranya berkomunikasi dan mengorek jawaban responden cukup baik, dan tercatat detail dan menarik. Selain itu, beberapa pertanyaan menurutnya juga sulit ditanyakan kepada responden,

seperti pertanyaan mengenai asset yang sering kali mendapat jawaban yang tidak jujur dari responden. Terakhir, terkadang kebingungannya adalah untuk menanyakan jumlah pengeluaran responden karena selain harus detail bertanya juga harus menghitungnya secara manual di kertas terpisah.

Sebagai PPL, Om Sam bercerita bahwa dirinya dalam sehari dapat mewawancarai hingga 13 responden dengan wilayah tempat responden yang berbagai macam rintangannya, mulai dari dipisah sungai hingga harus melewati padang rumput yang cukup luas untuk menjangkau satu responden. Dirinya juga bercerita pernah suatu kali mengunjungi responden yang lokasinya cukup jauh, namun saat didatangi calon responden tersebut tidak sedang berada di rumah. Hal ini cukup sering terjadi. Oleh karena itu, sesekali Om Sam ditemani oleh ketua RT untuk memudahkan mengetahui letak rumah responden serta keberadaannya. Kehadiran dan legitimasi dari ketua RT juga memudahkannya menemui 1–2 KK yang sudah diimbau di rumah, namun tetap saja jalan ke kebun saat akan dicacah. Om Sam bercerita jika dalam pengumpulan data yang dilakukannya ini kendala-kendala yang ditemui selain responden sulit ditemui adalah kendala cuaca karena di Mollo Utara hujan turun hampir setiap hari. Utamanya saat tim masuk ke TTS, siang hari memang cuaca meredup dan hujan kemudian turun hingga sore hari. Malam hari kemudian menjadi pilihan Om Sam untuk bergerak.

Mereka senang menjalani kegiatan ini tanpa pernah berkeluh kesah masalah honor ataupun masalah lain. Mereka berusaha mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan cara mereka sendiri. Selain itu, bagi beberapa PPL kegiatan Regsosek ini memberikan pengalaman baru pada mereka dalam melakukan pendataan karena mereka baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti Regsosek ini.

Terakhir, Apris Seo (34), PML Desa Nunusunu. Bapak dua anak ini juga perangkat Desa Nunusunu. Perannya adalah Kaur Umum. Sebagai kaur, ia cukup paham dengan kondisi sosial ekonomi desa-

nya. Ia juga termasuk dekat dengan warga. Sekali lagi, tantangan baginya adalah mengondisikan warganya untuk tetap ditempat saat dicacah. Menurutnya, pencacahan baru efektif di malam hari karena di siang semua warga berkebun. Tantangan lain adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah pendataan untuk bansos. Warga terlalu sering didata dan dibantu hingga akhirnya terbiasa menunggu bantuan datang setelah didata. Satu hal lagi yang ia keluhkan adalah peta batas RT dari BPS yang di beberapa titik berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Salah satu PPL yang ada di Desa Nunusunu adalah Daudens (32). Ia adalah lulusan STMIK Pasim Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini ia adalah operator sekolah di SD GMT Matsio. Perannya di sekolah membuat pekerjaan sebagai PPL ini seperti selayaknya guru yang berkunjung ke rumah muridnya karena memang di Nunusunu hanya ada 2 SD, yakni SD GMT Matsio dan SD Inpres Nunusunu. Pekerjaan dari BPS ini berkah untuk Daudens, Sam, Vinsen, Andriany, Yandri, Aris dan petugas mitra lainnya, sebagai tambahan pemasukan yang cukup baik secara nominal, sekalipun hanya dalam satu bulan saja.

G. Petugas Catat, Bantuan *Sudekat*

Profil Responden Regsosek Timor Tengah Selatan

Keluarga Halena Nubatonis (50) merupakan keluarga yang hidup di Desa Oelet. Tidak ada yang spesial, hanya keluarga yang hidup sederhana dengan rumah permanen dengan alas semen atap asbes dan cemplung sebagai tempat buang air besar. Setidaknya itulah gambaran rumah permanen di Oelet yang meskipun sudah memiliki rumah permanen, namun untuk tempat BAB banyak warga yang masih memanfaatkan cemplung. Cemplung adalah semacam tempat berbentuk persegi ukuran 1×1 meter dengan lubang di tengahnya yang ditutup dengan daun lontar kering. Kondisi seperti ini lumrah ditemui di TTS. Rumah dengan bentuk permanen, semi permanen, ataupun rumah tradisional yang terbuat dari daun banyak yang masih

menggunakan cemplung sebagai sarana BAB. Anak dari keluarga Helena Nubatonis, Vinsensius Tabun (20), baru lulus SMA, dan dalam Regsosek ini menjadi satu-satunya PPL asli Oelet. Dua orang PPL lain yang berasal dari Kota Soe, menginap di rumah ini.

Keluarga Ibu Milkaliu (50) sudah terbiasa dengan kerja pendataan di pedesaan karena dulu almarhum suaminya sudah menjadi petugas pendata sensus penduduk pada tahun 2000; sudah lama sekali, ketika pendataan yang dilakukan masih secara manual dan belum ada gawai yang digunakan sebagai alat pendukung. Oleh karena itu, keluarga Ibu Milkaliu sudah amat terbiasa dengan kerja pendata lapangan dan menyambut baik petugas pendata lapangan yang akan mewawancarainya. Tidak ada rasa kejenuhan yang ditampakkkan, melainkan rasa senang hati untuk menjawab setiap pertanyaan.

Sama halnya dengan Sefrita Ton (40) di Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin. Beliau bersama keluarga sehari-hari bekerja sebagai petani kebun yang menanam jagung, singkong, serta pepaya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari hasil bertanam jagung, Bapak Ton dalam setahun menghasilkan kurang lebih 30 kuda (satuan ikat dalam bahasa setempat yang nilainya kurang lebih sama dengan 20 kg/ikat). Dari hasil kebunnya tersebut, Bapak Ton menyisihkan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sehari-hari. Hasil panen Bapak Ton disimpan dalam lumbung dengan dikeringkan terlebih dahulu hingga dapat bertahan selama satu tahun untuk pemenuhan kebutuhan makan. Untuk konsumsi makanan tambahan lainnya, Bapak Ton mengandalkan hasil kebun saja, seperti singkong dan daunnya yang dimanfaatkan untuk sayur. Sementara itu, konsumsi daging sangat jarang. Di beberapa tempat ada ungkapan “*makan daging menunggu ada yang adakan pesta saja*”.

Bapak Ton seperti halnya keluarga Ibu Milkaliu (50) dari Oelet tinggal di rumah permanen hasil dari penjualan hasil kebunnya. Keluarga Bapak Ton terdiri dari istrinya dan empat anaknya yang semuanya bersekolah mulai dari SD hingga SMP. Keempat anaknya tersebut mendapatkan bantuan KIP untuk pendidikannya. Meskipun

pagi hingga menjelang siang bersekolah, anak-anak Bapak Ton ini turut membantu orang tuanya di kebun ketika sekolah usai. Jika Bapak Ton dan istri mulai berkebun dari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, anak-anaknya mulai menuju kebun pada pukul 11 siang hingga pukul 6 sore kembali dengan orang tuanya. Kondisi ini umum terjadi di Desa Nunusunu maupun di desa-desa lain di Kabupaten TTS. Banyak anak yang membantu orang tuanya bekerja untuk membersihkan ladang maupun menanam jagung.

Sementara itu, nasib berbeda antara Bapak Ton dan Ibu Milkaliu yang tinggal di rumah permanen dengan dinding tembok. Bapak Agustinus Lassa tinggal di rumah adat sederhana dengan ukuran kurang lebih 2×3 meter yang berdiri sendiri di atas bukit. Bapak Agustinus Lassa tinggal seorang diri setelah kepergian istrinya, sementara anak-anaknya tinggal dengan mertua masing-masing. Setiap hari, siang dan malam, Bapak Agustinus beraktivitas di rumahnya tanpa listrik. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia menanam jagung dan singkong untuk dikonsumsi. Dengan kondisi seperti itu, Bapak Agustinus tergolong pada kode 1 atau sangat miskin di dalam kolom isian kuesioner Regsosek.

Mayoritas desa dengan keluarga yang dikunjungi menyambut baik petugas pendata Regsosek. Mereka tidak ada yang melakukan penolakan untuk didata, semua pertanyaan dijawab tanpa ada yang terlewat, meskipun terkadang di semua wilayah PPL wajib untuk lancar berbahasa daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang benar. Keluarga yang dikunjungi juga telah mendapatkan pemberitahuan akan adanya survei Regsosek ini melalui ketua RT atau SLS sehingga menjadi salah satu yang memudahkan PPL untuk menemui mereka di lapangan. Meskipun demikian, pada beberapa kasus ada keluarga yang tidak ingin waktunya terbuang hanya untuk menunggu PPL sehingga mereka memilih pergi ke kebun untuk bekerja. Salah seorang responden ditemui di kebunnya dan didata oleh petugas pendata (Gambar 2.4).



Foto: Gustaf (2022)

Gambar 2.4 Responden tinggal seorang diri di bukit tanpa aliran listrik dan mengandalkan hasil kebun.

Dari semua desa yang dikunjungi, ada satu suara yang terdengar mengenai berbagai kegiatan survei yang dilakukan, yaitu didata untuk mendapat bantuan. Didata untuk dapat bantuan itulah gambaran yang didapatkan ketika menemui Ketua RT Desa Mauleum Bapak Timotius Toni berbarengan dengan proses verifikasi pendataan warga di lingkungannya. PPL yang datang bersama dengan PML sempat meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Pada proses verifikasi tersebut, tergambar bagaimana Bapak Ketua RT bersemangat ketika ditanya kondisi warganya yang akan didata.

“...miskin total...” “....satu per dua miskin...”. Itulah kata-kata yang sering muncul ketika PPL bertanya untuk melakukan konfirmasi terhadap kondisi keluarga yang ada di wilayahnya. Bapak Ketua RT adalah salah satu yang mengasosiasikan pendataan dengan bantuan. Beliau tidak ingin satu pun warganya nanti tidak mendapatkan ban-

tuan dari pemerintah. Beliau tahu betul bagaimana keadaan warganya dan tidak ingin menimbulkan kecemburuan antara satu sama lain sehingga hasilnya adalah sebagian besar warga yang terverifikasi adalah warga dengan kategori 1 dan 2, yaitu sangat miskin dan miskin.

Hal yang umum ditemui adalah anggapan bahwa pendataan ini untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Memang kondisinya seperti itu; warga yang didata selalu mengasosiasikan bantuan dengan berbagai pendataan yang dilakukan pemerintah. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena memang ada keterkaitan antara pendataan ini dan bantuan yang akan diberikan pemerintah, walaupun tidak terkait secara langsung. Namun, yang menjadi masalah adalah saat ada warga yang menganggap bahwa pendataan sama dengan akan mendapatkan bantuan, yang terjadi adalah ketidakjujuran warga dalam menjawab berbagai pertanyaan sensitif mengenai harta yang dimiliki dan pendapatan yang dihasilkan. Proses pendataan ini selain mengandalkan kecakapan PPL dalam wawancara, juga sangat mengandalkan kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan sehingga yang dikhawatirkan terjadi adalah ketika nantinya data yang dihasilkan tidak valid.

Meskipun demikian, gambaran-gambaran nyata di lapangan seperti ini dapat menjadi pertimbangan yang sangat berharga mengenai proses pendataan dengan berbagai dinamikanya yang terjadi. Koseka, PML, dan PPL tentu berusaha dengan berbagai cara untuk menghasilkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, berbagai keterbatasan baik dari sisi kompetensi serta kemampuan PPL yang beragam dan ketergantungan terhadap kejujuran jawaban dari responden tentu merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicari solusinya. Pengalaman Koseka, PML, dan PPL dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini sangat berharga untuk masukan bagi proses perencanaan survei serupa Regsosek ke depannya, mengingat ini masih pendataan awal Regsosek. Suara-suara dari bawah sangat dibutuhkan untuk dinarasikan serta didengar oleh pemangku kebijakan yang memegang kendali kegiatan.

H. Komitmen Mendata Keterbatasan: Suatu Penutup

Secara umum, Regsosek di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berjalan lancar dan disambut baik oleh masyarakat. Menariknya, sebagian besar masyarakat pedesaan di TTS cukup familiar dengan pendataan, khususnya dengan nama BPS. Hal ini dimungkinkan karena intensitas pendataan yang cukup sering dilakukan. Adapun beberapa kendala di lapangan yang terjadi adalah alokasi waktu Regsosek pada tahun ini yang bertepatan dengan datangnya awal musim hujan di TTS sehingga banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya di kebun untuk bercocok tanam dari pagi hingga sore hari.

Tantangan lain muncul sebagai konsekuensi medan TTS yang cenderung naik-turun, terjal, dan terpencar-pencar antarlokasi rumah warga. Pendekatan *by name by address* yang juga ditekankan pada Regsosek kali ini membuat petugas berkeringat lebih dibandingkan program pendataan lainnya. Mayoritas responden menyambut baik kedatangan petugas, namun kurang terbuka terkait pengeluaran rumah tangga mereka. Masing-masing petugas perlu mengembangkan pendekatannya sendiri kepada responden untuk mengorek informasi seputar pengeluaran dalam satu bulan yang paling mendekati pengeluaran sebenarnya. Pola pertanian subsistem yang hasilnya untuk dimakan sendiri juga memaksa petugas harus pandai-pandai menghitung konversi pengeluarannya.

Sebagian besar desa mendukung Regsosek dengan membantu mengondisikan warganya untuk sengaja di rumah dan menanti petugas pada hari yang telah disepakati antara petugas dan perangkat desa yang mendampingi. Sinergi ini tampak baik berjalan, di mana beberapa PPL pun berasal dari usulan perangkat desa, atau bahkan perangkat desa itu sendiri. Perlu ada penguatan pelatihan terutama pada materi teknik wawancara dan *probing* yang baik, khususnya bagi PPL pemula yang baru sekali menjadi mitra BPS. Program pendataan seperti ini juga menjadi oase bagi para pemuda TTS yang berhasil melalui *open recruitment* BPS TTS. Talenta yang terbukti mampu

bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi BPS TTS pada masa yang akan datang, mengingat pendataan seperti ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Adapun beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat pasca-Regsosek dilaksanakan adalah kesatuan data yang sebelumnya tercecer hendaklah didukung dengan validitas data Regsosek yang kuat. Sebelumnya, survei dinas kesehatan terkait *stunting* dilaksanakan sendiri. Survei dinas sosial terkait kesejahteraan sosial dilaksanakan sendiri. Survei terkait SDGs dilaksanakan sendiri. Sudah selayaknya data-data tersebut disatukan dalam pangkal data yang diawali dengan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini. Juga, terkait banyaknya masyarakat yang ternyata belum memiliki NIK dan BPJS, selanjutnya perlu mendapat perhatian dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan BPJS setempat agar pihak terkait terus berupaya mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Data Regsosek yang ada dalam bentuk kuesioner yang sangat komprehensif diharapkan dapat membantu memetakan bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat TTS secara lebih tepat dan strategis. Dalam hal ini, program dan bantuan yang dijalankan hendaknya menyentuh permasalahan di hulu dan tidak sekadar “tersalurkan” namun dampaknya hanya sesaat saja. Data Regsosek yang ada harus segera diolah dan disampaikan kepada stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti. Ibarat bermain bola, *kick off* sudah digulirkan oleh BPS melalui Regsosek, perlu pemain lain dalam perannya sebagai *second striker*, gelandang, bek, dan penjaga gawang untuk menuju satu gol, yakni Indonesia Maju yang sejahtera.

Daftar Pustaka

- Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Sadikin, A., & Handayani, N. B. (2022). *Penentuan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem 2021–2024*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- BPS. (2021). *Analisis produktivitas jagung dan kedelai di Indonesia 2021*. BPS.

- BPS. (2022). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah 2021–2022*. BPS.
- BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2022). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam angka tahun 2022*. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2023). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam angka tahun 2023*. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Nusa Tenggara Timur dalam angka tahun 2023*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Dashboard peta sebaran kerentanan stunting. *Kementerian Dalam Negeri-Dirjen Dukcapil*. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=b832cb42d23b4fe197e278ceca893ad7>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku saku hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Tahun 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- P3KE Kemenko PMK. (2023). *Sebaran data kemiskinan ekstrim*. Kemenko PMK. <https://p3ke.kemendkopmk.go.id/sebaran>
- Pageh, I. M. (2020). *Soenda kecil: dinamika menuju Indonesia raya*. Lakeisha.
- Peta Tematik Indonesia. (2015, 15 Mei). *Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Diakses pada 6 Maret, 2023, dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/05/15/administrasi-kabupaten-timor-tengah-selatan/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). *Terus perbaiki data, data kemiskinan ekstrem 2022–2024 diharapkan lebih mutakhir dan akurat*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/terus_perbaiki_data_data_kemiskinan_%0Aekstrem_2022_2024_diharapkan_lebih_mutakhir_dan_akurat%0A